

KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN PASAR BAWAH, KECAMATAN PASAR MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, PROVINSI BENGKULU

Agnes Aprilia Wulandari, Janthy T Hidayat, Novida Waskitaningsih.

ABSTRAK

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, Kelurahan Pasar Bawah RT 01, RT 05, dan RT 06 termasuk ke dalam kawasan permukiman kumuh dengan luas 14,27 Ha. Letaknya yang berada di sekitar pesisir pantai. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi permukiman di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna. Metode pengumpulan data yaitu observasi lapangan, kuesioner kepada masyarakat, studi literatur, dan survei instansi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting permukiman di Kelurahan Pasar Bawah yang paling berpengaruh dengan memiliki hasil tertinggi yaitu ketersediaan alat proteksi kebakaran dengan nilai 100% karena tidak tersediannya alat proteksi kebakaran di setiap rumah. Dan yang memiliki hasil terendah yaitu penataan kondisi bangunan dengan nilai 0 karena 100% penilaiannya cukup tertata. Dan berdasarkan data yang didapat dari tujuan satu penyebab permukiman kumuh di lokasi studi diambil dari parameter di setiap aspek yang memperoleh nilai yang paling tinggi yaitu ketersediaan alat proteksi kebakaran dengan nilai 100 karena tidak adanya alat proteksi kebakaran di setiap rumah, kepadatan bangunan masih menjadi penyebab utama dalam aspek bangunan hunian dengan total skoring 84, kelayakan kondisi drainase lingkungan (saluran air) menjadi penyebab utama dalam aspek drainase lingkungan dengan total skoring 61,6, penyebab utama dalam aspek pengelolaan persampahan dengan total skoring 59,2, kondisi infrastruktur jalan dan aksesibilitas di permukiman menjadi penyebab utama dalam aspek jalan lingkungan dengan total skoring 52,4, pemenuhan kebutuhan air minum menjadi penyebab utama dalam aspek penyediaan air minum dengan total skoring 48, dan ketersediaan MCK masih menjadi penyebab utama dalam pengelolaan air limbah dengan total skoring 23,2.

Kata Kunci: penyebab kekumuhan, permukiman kumuh, permukiman pesisir

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 Angka 13, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Penanganan permasalahan lingkungan sangat penting, salah satunya adalah penanganan permukiman kumuh. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk (1) memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia; serta (2) mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya, kawasan kumuh dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria tersebut antara lain kesesuaian dengan rencana tata ruang, tingkat

kepadatan dan keteraturan bangunan, kualitas bangunan, kondisi sarana dan prasarana dan utilitas umum, serta kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

Adapun menurut Muta'ali (2016) dalam Afia (2020) yang dimaksud permukiman kumuh adalah permukiman dengan rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut yang sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan tinggi, persyaratan rumah tidak mengindahkan kaidah kesehatan, kebutuhan sarana air bersih yang kurang memadai, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan yang sangat buruk, ruang terbuka yang hampir tidak ada, serta kelengkapan fasilitas sosialnya yang tidak mendukung.

Berdasarkan Adisasmata (2010), permukiman kumuh sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan kawasan yang apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, bobrok, berbahaya, tidak aman, kotor, di bawah

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi permukiman di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Permukiman

Permukiman diartikan sebagai perumahan atau kumpulan tempat tinggal dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan dan yang ada di dalam permukiman (Kuswartojo, 2005).

2.2 Permukiman Kumuh

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan

standar, tidak sehat, dan masih banyak stigma negatif lainnya.

Lokasi penelitian terletak di daerah pesisir di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 600/458 Tahun 2020 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkulu Selatan, lokasi ini dipilih karena Kelurahan Pasar Bawah juga dijadikan sebagai salah satu lokasi pariwisata, karena terletak di bagian selatan kawasan pesisir Kabupaten Bengkulu Selatan. Di sisi lain, menurut Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 tertulis bahwa di Kelurahan Pasar Bawah saat ini juga terdapat 3 RT yang termasuk kawasan kumuh, yaitu RT 01, 05, dan 06. Luas Wilayah kawasan kumuh di ketiga RT ini adalah 14,27 Ha, dengan jumlah bangunan 231 unit dan jumlah penduduk 859 jiwa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang faktor – faktor penyebab permukiman kumuh.

kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan dalam tata ruang, istilah kumuh banyak ditujukan kepada keadaan guna lahan atau zona atau kawasan yang sulit diperbaiki lagi, tetapi juga dapat ditujukan kepada keadaan yang secara fisik masih cukup baik dan tidak lagi memenuhi kebutuhan standar kelayakan (Soefaat, 1997 dalam Afriyadi, 2001).

2.3 Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut Suparlan (1984) dalam Nazlina (2018), terdapat beberapa karakteristik dan ciri permukiman kumuh, seperti:

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan

ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yang terwujud sebagai:
 - Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.

2.4 Landasan Kebijakan

1. Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. SK Bupati Bengkulu Selatan No. 600/258 Tahun 2020 Penempatan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Bengkulu Selatan

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasar Bawah. Kelurahan

Pasar Bawah merupakan salah satu kelurahan yang terletak di pesisir Bengkulu Selatan, dengan luas wilayah 69,61 Ha meliputi 9 (sembilan) RT. Penelitian ini hanya terfokus di kawasan kumuh di bagian pesisir dari wilayah Bengkulu Selatan dan yang telah dideliniasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 600/458 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dibagi kedalam 3 RT, yaitu RT 01, RT 05, dan RT 06, dengan luasan kumuh sebesar 14,27 Ha. Secara administrasi Kelurahan Pasar Bawah berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kelurahan Ketapang Besar

Sebelah Selatan : Sungai Air Manna

Sebelah Timur : Desa Kataping

Sebelah Barat : Samudera Hindia

Untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup wilayah dapat dilihat pada

Gambar 1

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara primer dan sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan survey langsung kelokasi penelitian, serta penyebaran kuesioner kepada wisatawan dan masyarakat yang berada di kawasan reklamasi Kota Ternate. Sedangkan untuk metode pengumpulan data sekunder yaitu melakukan studi kepustakaan atau kajian literatur serta survey instansi.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi kondisi eksisting, dan mengetahui faktor – faktor yang menjadi penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Pasar Bawah digunakan metode analisis deskriptif dan analisis persentase kuesioner untuk mengetahui persentase persepsi masyarakat terhadap kondisi eksisting dan penyebab kekumuhan di Kelurahan Pasar Bawah.



Gambar 1 Peta Lokasi Studi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Kondisi Permukiman di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu

Analisis kondisi eksisting di Kelurahan Pasar Bawah dilakukan dalam rangka menentukan faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam tumbuhnya permukiman kumuh dengan cara menentukan hasil tabulasi kuesioner pada setiap aspek dan indikator.

1. Bangunan Hunian

a) Kondisi Bangunan Rumah Tempat Tinggal

Kondisi bangunan rumah tinggal mencakup jenis bangunan permanen dan tidak permanen. Dilihat dari jenis bangunannya, sebagian besar kondisi bangunan rumah tempat tinggal di Kelurahan Pasar Bawah sudah permanen, yaitu 99%, dan hanya 1% rumah saja yang masih non permanen.



Bangunan Permanen

Bangunan Non Permanen

Gambar 2 Peta Lokasi Studi

b) Status Kepemilikan Rumah

Berdasarkan hasil kuesioner tentang status kepemilikan rumah, sebagian besar masyarakat menempati rumah milik sendiri, yaitu sebanyak 79%, walaupun satu rumah bahkan sampai ditempati oleh dua kepala keluarga karena keterbatasan biaya dan lahan untuk membangun rumah. Sementara itu, status rumah sewa sebanyak 21% karena sebagian besar ditinggali untuk lebih dekat mata pencaharian.



Sewa dan Kontrak

Rumah Milik Sendiri

Gambar 3 Status Kepemilikan Rumah

c) Kondisi Penataan Bangunan

Berdasarkan hasil kuesioner, terlihat bahwa seluruh masyarakat Kelurahan Pasar Bawah menyatakan bahwa kondisi penataan bangunan di kelurahan ini cukup tertata di RT 01, 05, dan 06 dengan total 100 responden menjawab cukup tertata.



Kondisi Bangunan Tertata

Gambar 4 Kondisi Bangunan Hunian yang Tertata

d) Kepadatan Bangunan Rumah Tinggal

Kepadatan bangunan rumah tinggal dapat dikategorikan sebagai padat dan tidak terlalu padat. Berdasarkan hasil kuesioner, terlihat bahwa sebagian besar bangunan di Kelurahan Pasar Bawah

tergolong padat, yaitu 80%, sementara 20% sisanya tidak terlalu padat.



Gambar 5 Kondisi Kepadatan Bangunan Hunian

e) Kepemilikan IMB

Sebagian besar rumah tinggal di Kelurahan Pasar Bawah sudah memiliki IMB, yaitu sebesar 81%, sementara 19% lainnya belum memiliki IMB.

2. Jalan Lingkungan

a) Kondisi Jalan Lingkungan

Kondisi jalan lingkungan permukiman di Kelurahan Pasar Bawah digolongkan dalam kategori sangat baik, cukup baik, dan kurang baik. Dilihat dari hasil kuesioner, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa kondisi jalan lingkungan di kelurahan ini cukup baik, yaitu 57%. Adapun yang menyatakan sangat baik adalah sebesar 42% dan kurang baik sebanyak 1%



Gambar 6 Kondisi Jalan Lingkungan

b) Kesesuaian Lebar Jalan Lingkungan Dengan Kondisi Yang Dibutuhkan

Kesesuaian lebar jalan lingkungan yang dimaksud merupakan kesesuaian lebar jalan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar lebar jalan lingkungan permukiman sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan

oleh masyarakat Kelurahan Pasar Bawah, yaitu sebesar 81%



Gambar 7 Kondisi Lebar Jalan Lingkungan

c) Kondisi Infrastruktur Jalan dan Aksesibilitas di Permukiman

Kondisi infrastruktur jalan dan aksesibilitas di permukiman Kelurahan Pasar Bawah dikategorikan dalam kondisi baik, cukup baik, dan kurang baik. Dilihat dari hasil kuesioner, sebagian besar kondisi jalan di Kelurahan Pasar Bawah sudah baik (54%). Baiknya kondisi infrastruktur jalan dan aksesibilitas permukiman ini dikarenakan lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan tempat hiburan, tempat rekreasi, pasar, dan pusat perkotaan, sehingga mudah diakses. Meskipun demikian ada sebanyak 6 % yang menjawab kurang baik.

3. Penyediaan Air Minum

a) Kondisi Kelayakan Penyediaan Air Minum

Kondisi penyediaan air minum di Kelurahan Pasar Bawah dikategorikan dalam kondisi cukup layak dan kurang layak. Dilihat hasil kuesioner, sebagian besar masyarakat Kelurahan Pasar Bawah menyatakan kondisi penyediaan air minum cukup layak, yaitu 98%.

b) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum

Pemenuhan kebutuhan air minum di Kelurahan Pasar Bawah berupa air tanah/sumur dan PDAM. Berdasarkan hasil

kuesioner, sebagian besar kebutuhan air di rumah tempat tinggal di Kelurahan Pasar Bawah dilayani oleh PDAM, yaitu sebesar 70%, dan 30% lainnya yang menggunakan air tanah/sumur.



PDAM Air Tanah/Sumur

Gambar 8 Kondisi Penyediaan Air Minum

4. Drainase Lingkungan

a) Kelayakan Kondisi Dainase Lingkungan (Saluan Air)

Kondisi drainase lingkungan di Kelurahan Pasar Bawah digolongkan dalam dua kategori, yaitu cukup layak dan kurang layak. Dilihat dari hasil kuesioner, sebagian besar masyarakat di Kelurahan Pasar Bawah menyatakan bahwa kondisi drainase lingkungan di kelurahan ini kurang layak, yaitu 70%.



Drainase yang Kurang Layak Drainase yan Cukup Layak

Gambar 9 Kondisi Drainase Lingkungan

b) Ketersediaan Saluran Drainase di Lingkungan Perumahan

Lingkungan permukiman di Kelurahan Pasar Bawah pada umumnya sudah dilengkapi dengan saluran drainase. Meskipun demikian, kondisi saluran drainase tersebut seringkali tidak memadai. Hal ini diperkuat oleh hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa sebagian besar lingkungan Kelurahan sudah memiliki drainase, yaitu

sebesar 86%. Dengan demikian, terdapat 14% lingkungan yang tidak memiliki drainase.



Saluran Drainase Lingkungan yang Belum Memiliki Drainase

Gambar 10 Ketersediaan Saluran Drainase

5. Pengelolaan Pembuangan Air Limbah

a) Sistem Pembuangan Air Limbah

Pengelolaan air limbah dibedakan menjadi dua, yaitu melalui septic-tank dan drainase lingkungan. Berdasarkan hasil observasi, mayoritas masyarakat sudah menggunakan septic-tank pribadi secara tradisional yang dibuat di belakang halaman rumah masing-masing. Namun masih banyak masyarakat yang kurang memikirkan tingkat keselamatan dengan membuat lubang septic-tank tanpa ditutup atau hanya ditutup menggunakan kayu yang seadanya (cubluk).



Septic-tank (Cubluk) Drainase Lingkungan

Gambar 11 Kondisi Air Limbah

b) Ketersediaan MCK di Rumah Tinggal

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar masyarakat sudah memiliki MCK pribadi di masing-masing rumah, meskipun masih ada juga masyarakat yang tidak mempunyai MCK pribadi.

Masyarakat yang belum memiliki MCK pribadi biasanya menggunakan MCK di rumah orangtua mereka yang lokasi rumahnya berdekatan.



Kondisi MCK

Gambar 12 Kondisi MCK

6. Pengelolaan Persampahan

a) Ketersediaan Tempat Sampah Rumah Tangga di Setiap Rumah

Berdasarkan hasil observasi, sudah banyak masyarakat yang menyediakan tempat sampah di perkarangan rumah mereka. Hal ini selaras dengan hasil penyebaran kuesioner. Sebagian besar masyarakat sudah memiliki tempat sampah di setiap rumah, yaitu sebesar 64%. Adapun 36% lainnya yang masih belum mempunyai tempat sampah di rumah tinggal



Tidak Adanya Tempat Sampah Ketersediaan Tempat Sampah

Gambar 13 Kondisi Ketersediaan Tempat Sampah

b) Kondisi Tempat Sampah di Rumah Tinggal

Dilihat dari kondisinya, mayoritas kondisi tempat sampah di setiap rumah tinggal tergolong buruk karena masyarakat menggunakan karung bekas atau pun drum bekas yang sudah rusak dan tidak layak sebagai tempat untuk menampung sampah. Kondisi ini juga terlihat dari hasil kuesioner, dimana

sebagian besar masyarakat menilai bahwa kondisi tempat sampah di setiap rumah dalam keadaan buruk, yaitu sebesar 98%



Kondisi Tempat Sampah yang Buruk Kondisi Tempat Sampah yang Baik

Gambar 14 Kondisi Persampahan

c) Sistem Pengolahan Pesampahan

Hasil observasi di atas selaras dengan hasil kuesioner, dimana sebagian besar masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan cara dibakar sebanyak 62%. Hanya terdapat 38% masyarakat yang membuang sampahnya ke TPS.



TPS

Dibakar

Gambar 15 Kondisi Sistem Pengelolaan Persampahan

7. Sistem Proteksi Kebakaran

a) Ketersediaan Alat Proteksi Kebakaran

Setiap rumah seharusnya memiliki alat proteksi kebakaran (APAR). Berdasarkan hasil kuesioner dan observasi, seluruh masyarakat di Kelurahan Pasar Bawah tidak memiliki alat proteksi kebakaran. Bahkan setiap kantor RT dan Kantor Kelurahan pun juga tidak memiliki alat proteksi kebakaran.

b) Upaya Masyarakat Saat Terjadi Bencana Kebakaran

Upaya masyarakat saat terjadi bencana kebakaran mencakup dua jenis jawaban yaitu memanggil damkar dan dengan sistem gotong royong. Dilihat dari hasil penyebaran kuesioner, sebagian besar masyarakat (95%) memilih untuk memanggil Damkar dan 5% lainnya memilih gotong royong untuk mengatasi bencana kebakaran.

4.2 Identifikasi Faktor penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Pasar Bawah

Hasil analisis pertama dinyatakan dalam kolom nilai dan hasil perkalian dalam bentuk skoring kemudian dipersentasekan untuk mengetahui persentase skoring masing-masing parameter, dengan skala 0-100 dimana semakin tinggi nilainya maka menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam penyebab permukiman kumuh. Faktor penyebab permukiman kumuh diambil dari setiap parameter di setiap aspek yang memperoleh nilai yang paling tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan persentase pada setiap aspek, yang mendapatkan nilai terbesar pada aspek bangunan hunian yaitu indikator kepadatan bangunan rumah tinggal dengan nilai 84,0, untuk aspek jalan lingkungan nilai yang tertinggi yaitu pada indikator kondisi infrastruktur jalan dan aksesibilitas di permukiman dengan nilai 52,4, untuk aspek penyediaan air minum nilai indikator yang tertinggi yaitu pemenuhan kebutuhan air minum dengan nilai 48,0, untuk aspek drainase lingkungan nilai indikator yang tertinggi yaitu kelayakan kondisi drainase di lingkungan perumahan dengan nilai 61,6, selanjutnya untuk aspek pengelolaan air limbah nilai indikator yang tertinggi yaitu ketersediaan MCK dengan nilai 23,2, untuk aspek pengelolaan persampahan nilai indikator

yang tertinggi yaitu kondisi tempat sampah yang ada di rumah tinggal dengan nilai 59,2, dan yang terakhir aspek sistem proteksi kebakaran nilai yang indikatornya tertinggi yaitu ketersediaan alat proteksi kebakaran di setiap rumah dengan nilai 100,0.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting permukiman di Kelurahan Pasar Bawah yang paling berpengaruh dengan memiliki hasil tertinggi yaitu ketersediaan alat proteksi kebakaran dengan nilai 100% karena tidak tersedianya alat proteksi kebakaran di setiap rumah. Dan yang memiliki hasil terendah yaitu penataan kondisi bangunan dengan nilai 0 karena 100% penilaiannya cukup tertata.
2. Berdasarkan data yang didapat dari tujuan satu penyebab permukiman kumuh di lokasi studi diambil dari parameter di setiap aspek yang memperoleh nilai yang paling tinggi yaitu ketersediaan alat proteksi kebakaran dengan nilai 100 karena tidak adanya alat proteksi kebakaran di setiap rumah, kepadatan bangunan masih menjadi penyebab utama dalam aspek bangunan hunian dengan total skoring 84, kelayakan kondisi drainase lingkungan (saluran air) menjadi penyebab utama dalam aspek drainase lingkungan dengan total skoring 61,6, penyebab utama dalam aspek pengelolaan persampahan dengan total skoring 59,2, kondisi infrastruktur jalan dan aksesibilitas di permukiman menjadi penyebab utama dalam aspek jalan lingkungan dengan total skoring 52,4, pemenuhan kebutuhan air minum menjadi penyebab utama dalam aspek penyediaan air minum dengan total skoring 48, dan ketersediaan MCK

masih menjadi penyebab utama dalam pengelolaan air limbah dengan total skoring 23,2.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran terkait penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu dengan jelas mengatasi permasalahan permukiman kumuh di RT 01, RT 05, dan RT 06 dengan aksi nyata serta himbuan aktif pemerintah dalam menjaga masyarakat untuk sadar dalam memahami serta turut aktif dalam pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan.
2. Peningkatan infrastruktur yang sesuai dengan standar teknis yang berlaku bagi kawasan permukiman RT 01, RT 05 dan RT 06 yaitu kepadatan bangunan hunian, kondisi infrastruktur jalan dan aksesibilitas di permukiman, pemenuhan kebutuhan air minum, kelayakan kondisi drainase lingkungan, ketersediaan MCK, kondisi tempat sampah yang ada di rumah tinggal, ketersediaan alat proteksi kebakaran di setiap rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Bengkulu Selatan. (2020). *Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 600/458 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bengkulu Selatan*
- Diana, M, A. (2015). *Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan*. Malang: Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Nasional Malang.
- Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. (2001). *Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang*.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2016). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*.
- Nugraha, A, P, S. (2019). *Identifikasi Permukiman Kumuh Pada Tingkat RW dan Arahan Penanganan Di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*. Semarang: Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036*.
- Putra. K. E. & Andriana. M. (2017). *Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan*. *Arsitektur dan Perkotaan*, 08(02), 97-104.
- Ramadhan, A, I. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Bogor*. Bogor: Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Pakuan.
- Sari, A. R & Ridlo, M. A. (2021). *Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan*. *Kajian Ruang*. 01(02), 160-176

Suud, B., & Navitas, P. (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman Di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya*. Jurnal Teknik ITS, 4(1), 33–35.

PENULIS:

1. Agnes Aprilia Wulandari, S.P.W.K. Alumni (2024) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,

Fakultas Teknik, Universitas Pakuan. agnesapriaw@gmail.com

8. Dr. Ir. Janthy Trilusianthy Hidayat, M.si. Pembimbing I/Dosen Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pakuan.
9. Novida Waskitaningsih, S.T., M.T. Pembimbing II/Dosen Program Studi Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pakuan.